

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengungkapan (*Disclosure*)

2.1.1 Pengertian Pengungkapan

Secara konseptual, pengungkapan merupakan bagian integral dari pelaporan keuangan. Secara teknis, pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh statemen keuangan. Evans (2003) dalam Suwardjono (2008) mengartikan pengungkapan sebagai berikut:

Disclosure means supplying information in the financial statements themselves, the notes to the statements, and the supplementary disclosure associated with the statements. It does not extend to public or private statements by made management or information provided outside the financial statement.

Evans (2003) dalam Suwardjono (2008) juga menyatakan bahwa pernyataan manajemen dalam surat kabar atau media masa lain serta informasi di luar ruang lingkup pelaporan keuangan tidak termasuk dalam pengertian pengungkapan. Di sisi lain, pengungkapan sering juga dimaknai sebagai penyediaan informasi lebih dari apa yang dapat disampaikan dalam bentuk statemen keuangan formal.

2.1.2 Pihak yang Dituju

Kerangka konseptual telah menetapkan bahwa investor dan kreditor merupakan pihak yang dituju oleh pelaporan keuangan, sehingga pengungkapan ditujukan terutama untuk mereka. Namun, pengungkapan yang dilakukan perusahaan pada dasarnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi para pemangku kepentingan, seperti investor, kreditor, pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terkait. Oleh karena itu, pengungkapan menuntut lebih dari sekedar pelaporan

keuangan tetapi meliputi pula penyampaian informasi kuantitatif, maupun kualitatif. Beragam pihak yang dituju dan model pengambilan keputusan yang kurang dapat diidentifikasi, pengungkapan cenderung untuk meluas dan jarang menjadi sempit atau spesifik (Suwardjono, 2008).

2.1.3 Fungsi dan Tujuan Pengungkapan

Tujuan pengungkapan adalah menyajikan informasi yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan untuk melayani berbagai pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda (Suwardono, 2008). Dalam implementasinya, investor dan kreditor bervariasi dalam hal kecanggihannya (*sophistication*). Hal ini dikarenakan pasar modal merupakan sarana utama pemenuhan dana dari masyarakat, sehingga pengungkapan dapat diwajibkan untuk melindungi (*protective*), informatif (*informative*), dan melayani kebutuhan khusus (*differential*).

a. Tujuan Melindungi

Tujuan melindungi dilandasi oleh gagasan bahwa tidak semua pemakai cukup canggih sehingga pemakai yang naif perlu dilindungi dengan mengungkapkan informasi yang mereka tidak mungkin memperolehnya atau tidak mungkin mengolah informasi untuk menangkap substansi ekonomi yang melandasi suatu pos statemen keuangan. Dengan kata lain, pengungkapan dimaksudkan untuk melindungi perlakuan manajemen yang mungkin kurang adil dan terbuka (*unfair*). Dengan tujuan ini, tingkat dan volume pengungkapan akan menjadi tinggi.

b. Tujuan Informatif

Tujuan informatif dilandasi oleh gagasan bahwa pemakai yang dituju sudah jelas dengan tingkat kecanggihan tertentu. Dengan demikian, pengungkapan diarahkan untuk menyediakan informasi yang dapat membantu keefektifan pengambilan keputusan pemakai tersebut.

c. Tujuan Kebutuhan Khusus

Tujuan ini merupakan gabungan dari tujuan perlindungan publik dan tujuan informatif. Apa yang harus diungkapkan kepada publik dibatasi dengan apa yang dipandang bermanfaat bagi pemakai yang dituju sementara untuk tujuan pengawasan, informasi tertentu harus disampaikan kepada badan pengawas berdasarkan peraturan melalui formulir-formulir yang menuntut pengungkapan secara rinci.

2.1.4 Sifat Pengungkapan

Sifat pengungkapan yang dilakukan perusahaan terbagi menjadi dua, yakni pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) dan pengungkapan wajib (*discretionary disclosure*). Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang dilakukan perusahaan di luar apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawas. Sebaliknya, pengungkapan wajib adalah pengungkapan yang dilakukan perusahaan atas apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawas.

2.1.5 Pengungkapan *Sustainability Report*

Belkoui (2004) menyatakan bahwa salah satu tujuan dari pengungkapan adalah untuk memberikan informasi yang membantu investor dan kreditor dalam menilai resiko dan menilai pengembalian atas investasi. Pengungkapan *sustainability report*

yang dilakukan oleh suatu perusahaan adalah mengungkapkan (*disclose*) atau mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan mengenai kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Tanggung jawab sosial perusahaan yang mencakup aspek lingkungan hidup, ketenagakerjaan, pengembangan sosial dan masyarakat, serta tanggung jawab produk wajib diungkapkan perusahaan dalam *sustainability report*, sementara pengungkapan di luar aspek-aspek tersebut dalam *sustainability report* bersifat sukarela.

2.1.6 Pedoman Pengungkapan *Sustainability Report*

Pedoman mengenai pengungkapan *sustainability report* di Indonesia masih bersifat sukarela dan belum ada peraturan khusus yang mengaturnya, sehingga Indonesia dalam pengungkapan *sustainability report* menggunakan standar internasional. Standar internasional yang paling banyak digunakan di Indonesia adalah GRI *Guidelines*, karena GRI *Guidelines* memberikan pedoman yang paling lengkap mengenai pengungkapan *sustainability report*. GRI *Guidelines* dibuat oleh *Global Reporting Initiatives* yang merupakan organisasi nonprofit yang memiliki misi untuk memberdayakan para pengambilan keputusan melalui standar keberlanjutan mencapai ekonomi global yang berkelanjutan.

GRI pada 22 Mei 2013 meluncurkan standar GRI generasi keempat atau GRI-G4. GI-G4 merupakan pembaruan dari pedoman GRI periode sebelumnya. Menurut GRI-G4 *Guidelines*, setiap organisasi yang melakukan *sustainability report* wajib memperhatikan prinsip-prinsip pelaporan. Prinsip pelaporan berperan penting untuk mencapai transparansi pelaporan keberlanjutan. Prinsip-prinsip tersebut dibagi

menjadi dua kelompok: prinsip-prinsip untuk menentukan konten laporan dan prinsip-prinsip untuk menentukan kualitas laporan. Prinsip-prinsip untuk menentukan konten laporan menjelaskan proses yang harus diterapkan untuk mengidentifikasi konten laporan apa yang harus dibahas dengan mempertimbangkan aktivitas, dampak, dan harapan serta kepentingan yang substantif dari para pemangku kepentingannya. Prinsip-prinsip untuk menentukan konten laporan menurut GRI-G4 *Guidelines* antara lain:

a. Pelibatan pemangku kepentingan

Organisasi harus mengidentifikasi para pemangku kepentingannya, dan menjelaskan bagaimana organisasi telah menanggapi harapan dan kepentingan wajar dari mereka.

b. Konteks keberlanjutan

Laporan harus menyajikan kinerja organisasi dalam konteks keberlanjutan yang lebih luas. Konteks yang mendasari pelaporan keberlanjutan adalah bagaimana sebuah organisasi berkontribusi, atau bertujuan untuk memberikan kontribusi di masa mendatang, terhadap peningkatan atau penurunan kondisi, pengembangan, dan tren ekonomi, lingkungan, serta sosial di tingkat lokal, regional, atau global.

c. Materialitas

Laporan harus mencakup aspek yang mencerminkan dampak ekonomi, lingkungan dan sosial yang signifikan dari organisasi atau secara substansial mempengaruhi asesmen dan keputusan pemangku kepentingan. Materialitas adalah ambang batas di mana aspek menjadi cukup penting untuk dilaporkan.

d. Kelengkapan

Laporan harus berisi cakupan aspek material dan *boundary*, cukup untuk mencerminkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang signifikan, serta memungkinkan pemangku kepentingan dapat menilai kinerja organisasi dalam periode pelaporan.

Prinsip-prinsip untuk menentukan kualitas laporan memberikan arahan berupa pilihan-pilihan untuk memastikan kualitas informasi dalam laporan keberlanjutan, termasuk penyajiannya yang tepat. Prinsip-prinsip untuk menentukan kualitas laporan memberikan arahan berupa pilihan-pilihan untuk memastikan kualitas informasi dalam laporan keberlanjutan, termasuk penyajian yang tepat. Kualitas informasi adalah hal yang penting untuk memungkinkan para pemangku kepentingan dapat membuat asesmen kinerja masuk akal serta mengambil tindakan yang tepat. Prinsip-prinsip untuk menentukan kualitas laporan keuangan yang tercantum dalam GRI-G4 antara lain:

a. Keseimbangan

Laporan harus mencerminkan aspek-aspek positif dan negatif dari kinerja organisasi untuk memungkinkan dilakukannya asesmen yang beralasan atas kinerja organisasi secara keseluruhan.

b. Komparabilitas

Organisasi harus memilih, mengumpulkan, dan melaporkan informasi secara konsisten. Informasi yang dilaporkan harus disajikan dengan cara yang memungkinkan para pemangku kepentingan menganalisis perubahan kinerja

organisasi dari waktu ke waktu, dan yang dapat mendukung analisis relatif terhadap organisasi lainnya.

c. Akurasi

Informasi yang dilaporkan harus cukup akurat dan terperinci bagi para pemangku kepentingan untuk dapat menilai kinerja organisasi.

d. Ketepatan waktu

Organisasi harus membuat laporan dengan jadwal yang teratur sehingga informasi tersedia tepat waktu bagi para pemangku kepentingan untuk membuat keputusan yang tepat.

e. Kejelasan

Organisasi harus membuat informasi tersedia dengan cara yang dapat dimengerti dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan yang menggunakan laporan.

f. Keandalan

Organisasi harus mengumpulkan, mencatat, menyusun, menganalisis dan mengungkapkan informasi serta proses yang digunakan untuk menyiapkan laporan agar dapat diuji, dan hal itu akan menentukan kualitas serta materialitas informasi.

2.2 Sustainability Report

American Institute of Certified Public Accountant (AICPA) mendefinisikan laporan berkelanjutan (*sustainability report*) sebagai laporan yang mencakup kinerja lingkungan, tanggung jawab sosial, dan kinerja ekonomi suatu organisasi. OJK mendefinisikan laporan berkelanjutan sebagai bentuk laporan yang diumumkan oleh emiten, perusahaan publik, atau lembaga jasa keuangan dalam rangka untuk

mengungkapkan (*disclose*) atau mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan mengenai kinerja ekonomi, keuangan, lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik (LST) secara akuntabel. Menurut Elkington dalam Tarigan (2015), *sustainability report* adalah laporan yang tidak hanya memuat informasi kinerja keuangan perusahaan, tetapi juga informasi non keuangan seperti aktivitas sosial dan lingkungan perusahaan yang memungkinkan perusahaan bertumbuh secara berkesinambungan (*sustainable performance*). Perusahaan yang mempublikasikan laporan keberlanjutan (*sustainability report*) berarti memberikan informasi yang berkaitan tentang hubungan perusahaan dengan karyawan, masyarakat, dan lingkungan.

2.3 Regulasi *Sustainability Report* di Indonesia

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menjelaskan mengenai pengungkapan lingkungan melalui Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 (Revisi 2009) menyatakan bahwa entitas dapat pula menyajikan, terpisah dari laporan keuangan, laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*), khususnya bagi industri di mana faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap karyawan sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting. Laporan tambahan tersebut di luar ruang lingkup Standar Akuntansi Keuangan.

Peraturan mengenai kewajiban dalam pengungkapan lingkungan juga dituangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam UU PT Nomor 40 Tahun 2007 pada pasal 1 menjelaskan mengenai pengertian tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) perusahaan bahwa:

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Dalam UU PT Nomor 40 Tahun 2007 merujuk pada pasal 66. Peraturan ini mengungkapkan bahwa laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kewajiban dalam tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) perusahaan kemudian kembali ditekankan pada UU PT Nomor 40 Tahun 2007 pasal 74 yang menyatakan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan BAPEPAM-LK Nomor: KEP-431/BL/2012 mengenai Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik menyatakan bahwa Emiten atau Perusahaan Publik yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Bapepam dan LK paling lama 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir. Laporan tahunan wajib memuat ikhtisar data keuangan penting, laporan dewan komisaris, laporan direksi, profil perusahaan, analisis dan pembahasan manajemen, tata kelola perusahaan, tanggung jawab sosial perusahaan, laporan keuangan tahunan yang telah diaudit, dan surat pernyataan tanggung jawab dewan komisaris dan direksi atas kebenaran isi laporan tahunan. Dalam pasal 2 huruf

h mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) menyatakan bahwa Emiten atau Perusahaan Publik dapat mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1) pada laporan tahunan atau laporan tersendiri yang disampaikan bersamaan dengan laporan tahunan kepada Bapepam dan LK, seperti laporan keberlanjutan (*sustainability report*) atau laporan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility report*).

Berdasarkan peraturan BAPEPAM LK, dapat diketahui bahwa saat ini pengungkapan *sustainability report* masih bersifat sukarela (*voluntary*) tetapi tanggung jawab sosial perusahaan yang menjadi bagian dalam laporan berkelanjutan merupakan pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*). Item-item yang diungkapkan dalam *sustainability report* bersifat sukarela karena belum diatur oleh UU maupun peraturan BAPEPAM LK. Hal ini sesuai dengan pernyataan OJK pada Infografis Lembaga Jasa Keuangan dan Emiten Penerbit Laporan Berkelanjutan 2016, yaitu bahwa pengungkapan *sustainability report* di Indonesia masih sebatas bersifat sukarela (*voluntary*). (www.ojk.go.id)

2.4 Pelaporan Keuangan

Menurut Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (KKPK) tujuan pelaporan keuangan bertujuan umum adalah untuk menyediakan informasi keuangan tentang entitas pelapor yang berguna untuk investor saat ini dan investor potensial, pemberi pinjaman, dan kreditor lainnya dalam membuat keputusan tentang penyediaan sumber daya kepada entitas. Keputusan tersebut termasuk pembelian, penjualan, atau kepemilikan instrumen ekuitas dan instrumen utang, serta penyediaan atau penyelesaian pinjaman dan bentuk kredit lainnya.

Dalam melakukan penilaian prospek untuk arus kas masuk neto masa depan dari suatu entitas, investor saat ini dan investor potensial, pemberi pinjaman, serta kreditor lainnya membutuhkan informasi mengenai sumber daya entitas, klaim terhadap entitas, dan seberapa efisien dan efektif manajemen entitas dan dewan komisaris telah melaksanakan tanggung jawabnya dalam penggunaan sumber daya tersebut. Contoh tanggung jawab tersebut termasuk melindungi sumber daya entitas dari dampak faktor ekonomi yang tidak menguntungkan seperti perubahan harga dan teknologi serta memastikan bahwa entitas mematuhi hukum yang berlaku, peraturan, dan provisi kontraktual. Informasi mengenai pertanggungjawaban manajemen juga berguna untuk pengambilan keputusan oleh investor saat ini, pemberi pinjaman, dan kreditor lainnya yang memiliki hak suara atau pengaruh atas tindakan manajemen.

Banyak investor saat ini dan investor potensial, pemberi pinjaman, dan kreditor lainnya tidak dapat mensyaratkan entitas pelapor untuk menyediakan informasi secara langsung kepada mereka dan harus mengandalkan laporan keuangan bertujuan umum untuk mendapatkan informasi keuangan yang mereka butuhkan. Oleh karena itu, mereka merupakan pengguna utama laporan keuangan bertujuan umum. Akan tetapi, laporan keuangan bertujuan umum tidak dan tidak dapat menyediakan seluruh informasi yang dibutuhkan oleh investor saat ini, investor potensial, pemberi pinjaman, dan kreditor lainnya. Para pengguna tersebut perlu mempertimbangkan informasi terkait dari sumber lainnya, sebagai contoh, kondisi dan ekspektasi ekonomi secara umum, peristiwa dan kondisi politik, serta prospek masa depan industri dan entitas.

2.5 Keinformatifan Laba

Menurut Tudor (2009) dan Zarowin (2002) pengertian keinformatifan laba adalah:

Earning informativeness (or stock price informativeness) as the amount of information about future earning or future cash flows impounded in the current period stock return

Menurut Roychowdhury dan Sletten (2012) menyebut laba yang informatif sebagai keinformatifan laba yang didefinisikan sebagai kemampuan laba dalam periode berjalan yang dapat membantu investor dalam menentukan tingkat pengembalian atau return di masa depan. Berdasarkan definisi diatas, informasi tentang laba masa depan atau arus kas masa depan terkandung di dalam return saham sekarang. Pengertian tersebut berarti harga saham berkaitan erat dengan laba. Menurut Tudor (2009), informasi harga saham dengan laba berhubungan positif. Apabila laba yang dilaporkan meningkat atau secara akurat, harga saham akan meningkat.

Harga saham merupakan cerminan mekanisme pasar berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran. Harga saham menggambarkan penilaian pasar modal atas kemampuan perusahaan memperoleh pendapatan dari waktu ke waktu, besarnya resiko atas kelangsungan pendapatan dan sekumpulan faktor-faktor lain. Secara umum, harga pasar dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang muncul dari dalam perusahaan dan dapat dikendalikan oleh perusahaan, seperti kemampuan manajemen dalam mengelola modal yang ada (*solvability*), kemampuan manajemen dalam mengelola kegiatan operasional perusahaan (*growth opportuittes*), maupun kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan (*profitability*).

Penelitian yang dilakukan Ball dan Brown (1968) merupakan penelitian awal yang menjelaskan hubungan informasi laba akuntansi dan harga saham. Ketika perusahaan mengumumkan laba yang mengalami kenaikan, maka akan terjadi kecenderungan perubahan positif pada harga saham dan sebaliknya jika laba mengalami penurunan maka akan terjadi perubahan negatif pada harga saham. Secara umum penelitian yang dilakukan Ball dan Brown ini menunjukkan bahwa laba akuntansi yang dipublikasikan melalui laporan keuangan bermanfaat bagi para investor atau mempunyai kandungan informasi. Penelitian ini kemudian mendorong dilakukannya penelitian-penelitian yang sejenis yang menyatakan bahwa terdapat hubungan antara laba akuntansi dengan harga saham.

2.6 Stakeholder Theory

Pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam suatu organisasi adalah individu dan kelompok yang bergantung pada perusahaan untuk mencapai tujuan pribadi mereka dan perusahaan bergantung kepada mereka untuk keberlangsungan usahanya (Rhenman dalam Freeman ((2004)). Teori *stakeholder* menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri, namun harus memberikan manfaat bagi stakeholdernya, yaitu pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analisis dan pihak lain (Ghozali dan Chariri, 2007). *Stakeholder* merupakan pihak yang dipengaruhi dan mempengaruhi organisasi. Ketika *stakeholder* mengendalikan sumber ekonomi yang penting bagi perusahaan, perusahaan akan bereaksi dengan cara-cara yang memuaskan keinginan *stakeholder*. Organisasi akan memilih *stakeholder* yang dipandang penting dan mengambil tindakan yang dapat menghasilkan hubungan yang harmonis dengan

stakeholdernya (Ullman dalam Nugroho, 2012). Teori *stakeholder* juga menolak pemisahan antara nilai finansial dan nilai sosial, karena kegiatan ekonomi organisasi akan menghasilkan efek sosial. Kekuatan ekonomi dan sosial suatu organisasi secara bersama-sama akan mempengaruhi keberhasilan dari suatu organisasi (Freeman, 2004). Pengungkapan *sustainability report* adalah salah satu cara bagi perusahaan untuk memberikan informasi ekonomi, lingkungan, dan sosial kepada para *stakeholder*, terutama kepada pemegang saham dan kreditor. Perusahaan mengungkapkan *sustainability report* untuk menjaga hubungan baik dan keterbukaan informasi akan meningkatkan nilai *stakeholder* dan mengurangi kerugian-kerugian yang mungkin ditanggung *stakeholder*, sehingga *stakeholder* akan mendukung pencapaian tujuan perusahaan.

2.7 Teori Legitimasi

Ghozali dan Chariri (2007) menjelaskan teori legitimasi sangat bermanfaat dalam menganalisis perilaku organisasi, disamping itu legitimasi juga merupakan hal yang penting bagi organisasi, batasan-batasan yang ditekankan oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial, reaksi terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya analisis perilaku organisasi dengan memperhatikan lingkungan. Teori legitimasi menegaskan bahwa perusahaan terus berupaya untuk memastikan jika operasi perusahaan yang dilakukan masuk dalam bingkai dan norma masyarakat atau lingkungan perusahaan berada. Ghozali dan Chariri (2007) berusaha untuk memastikan bahwa aktifitas (perusahaan) diterima oleh pihak luar sebagai suatu yang “sah”, disamping itu teori legitimasi dilandasi “kontrak sosial” yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat. Semua institusi sosial tidak terkecuali perusahaan beroperasi di masyarakat melalui kontrak

sosial, baik eksplisit maupun implisit, dimana kelangsungan hidup dan pertumbuhannya didasarkan pada hasil akhir yang secara sosial dapat diberikan kepada masyarakat luas dan distribusi manfaat ekonomi, sosial atau politik kepada kelompok sesuai dengan power yang dimiliki. Apabila perusahaan melakukan pengungkapan sosial, maka perusahaan merasa keberadaan dan aktivitasnya akan mendapat “status” dari masyarakat atau lingkungan perusahaan tersebut beroperasi, hal ini mengartikan perusahaan tersebut terlegitimasi.

Teori legitimasi menganjurkan perusahaan untuk meyakinkan bahwa aktivitas dan kinerjanya dapat diterima oleh masyarakat. Perusahaan menggunakan laporan berkelanjutan mereka untuk menggambarkan kesan tanggung jawab lingkungan, sehingga mereka diterima oleh masyarakat. Dengan adanya penerimaan dari masyarakat tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan.

2.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama menurut Swarnapali RM (2019) dengan judul “*Sustainability Disclosure and Earnings Informativeness: Evidence from Sri Lanka*”. Penelitian dilakukan pada 220 perusahaan yang terdaftar pada *Colombo Stock Exchange (CSE)* di Sri Lanka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *sustainability disclosure* berpengaruh positif terhadap *earnings informativeness*.

Penelitian kedua menurut Bona-Sanchez *et al.* (2016) dengan judul “*Sustainability Disclosure, Dominant Owners and Earnings Informativeness*”. Penelitian ini dilakukan pada 112 perusahaan non keuangan yang terdaftar pada *Spanish Stock Exchange* di Spanyol. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *sustainability*

disclosure berpengaruh positif terhadap *earnings informativeness*. Pengaruh positif tersebut didorong dengan adanya peningkatan arus kas kepemilikan dominan.

Penelitian ketiga menurut Yulianti D.A (2017) dengan judul “*Pengaruh Sustainability Disclosure terhadap Keinformatifan Laba Akuntansi dengan Konsentrasi Kepemilikan sebagai Variabel Moderasi*”. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 2013-2015. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *sustainability disclosure* berpengaruh positif terhadap *keinformatifan laba akuntansi*. *Konsentrasi kepemilikan* berpengaruh positif namun tidak dapat memoderasi pengaruh *sustainability disclosure* terhadap *keinformatifan laba akuntansi*.

Penelitian keempat menurut Wibowo I dan Faradiza S.A (2015) dengan judul “*Dampak Pengungkapan Sustainability Report terhadap Kinerja Keuangan dan Pasar Perusahaan*”. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di BEI selama periode 2008-2011. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengungkapan *sustainability report* tidak mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan namun berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja pasar.

Penelitian kelima menurut Mulyadi P.M (2018) dengan judul “*Pengaruh Corporate Social Responsibility, Profitabilitas, Leverage, dan Pertumbuhan Perusahaan terhadap Keinformatifan Laba dengan Kinerja Lingkungan sebagai Variabel Moderasi*”. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 2014-2015. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengungkapan *corporate social responsibility* dan *leverage* berpengaruh negatif terhadap *keinformatifan laba* sedangkan *profitabilitas* dan *pertumbuhan perusahaan*

berpengaruh positif terhadap keinformatifan laba. Variabel kinerja lingkungan dapat memperkuat hubungan pengungkapan *corporate social responsibility*, profitabilitas, dan pertumbuhan perusahaan terhadap keinformatifan laba, tetapi memperlemah *leverage* dan keinformatifan laba.

Penelitian keenam menurut Paulinda Awuy dkk. (2016) dengan judul “*Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Earnings Response Coefficient (ERC) (Suatu Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2010-2013)*.” Penelitian ini dilakukan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI selama periode 2010-2013. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang dilakukan perusahaan tidak berpengaruh terhadap *Earnings Response Coefficient (ERC)* perusahaan.

2.9 Pengembangan Hipotesis

Teori *stakeholder* menyatakan bahwa perusahaan dan *stakeholder* saling mempengaruhi, sehingga perusahaan akan berusaha menciptakan hubungan baik dengan para *stakeholder*, salah satunya dengan memenuhi kebutuhan *stakeholder* akan informasi. Pengungkapan *sustainability report* oleh manajer akan meningkatkan transparansi dan mengurangi asimetri informasi antara manajer dan pemilik (prinsipal). Pengungkapan *sustainability report* akan memberikan informasi mengenai kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan kepada pemilik (investor dan kreditor) sehingga investor dan kreditor memiliki informasi lebih mengenai kinerja perusahaan. Investor dan kreditor akan menilai perusahaan yang melakukan pengungkapan *sustainability report* memiliki resiko yang lebih rendah, karena investor dan kreditor mengetahui

bagaimana kinerja perusahaan yang sesungguhnya secara keuangan dan non keuangan dalam *sustainability report* dan tingkat ketidakpastian akan keberlanjutan usaha perusahaan di masa yang akan datang akan menjadi berkurang. Dengan adanya tambahan informasi yang diberikan oleh perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan kepada perusahaan tersebut dan mampu meningkatkan keinformatifan laba.

Menurut teori legitimasi, tindakan yang dilakukan oleh suatu entitas merupakan tindakan yang diinginkan dan telah sesuai dengan norma secara sosial sehingga teori legitimasi terkait perilaku etis yang dilakukan oleh perusahaan termasuk dalam menghasilkan dan merilis informasi yang berkualitas. Salah satu bentuk pertanggungjawabannya dengan menerbitkan *sustainability report* yang menggambarkan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sekaligus dalam mencerminkan kondisi keuangan perusahaan. Dengan adanya penerimaan dari masyarakat tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan. Hal tersebut dapat mendorong atau membantu investor dalam melakukan pengambilan keputusan investasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Swarnapali RM (2019) yang dilakukan di Sri Lanka, membuktikan bahwa pengungkapan *sustainability report* berpengaruh positif terhadap keinformatifan laba. Penelitian yang dilakukan di Indonesia oleh Yulianti, D.A pada 2017 juga membuktikan bahwa pengungkapan *sustainability report* berpengaruh positif terhadap keinformatifan laba.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, hipotesis yang akan dibuktikan untuk penelitian ini adalah:

H₁: Pengungkapan *sustainability report* berpengaruh positif terhadap keinformatifan laba.

